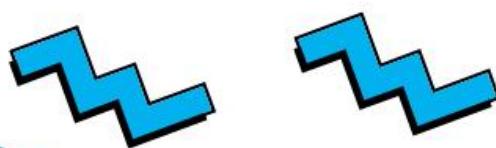
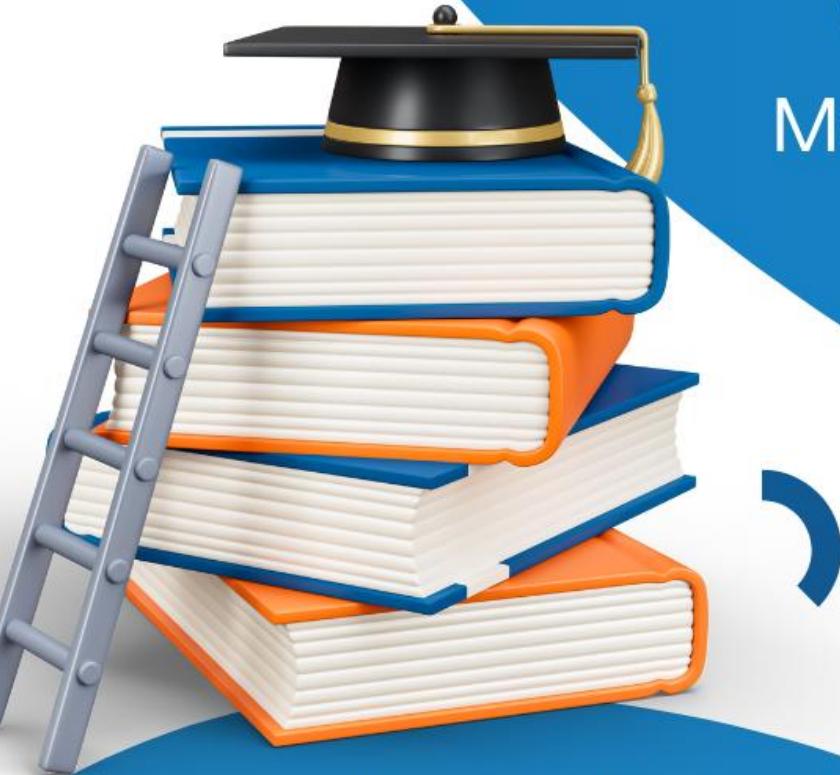


# POLICY PAPER

Peningkatan Akses dan  
Kualitas Pendidikan  
di Provinsi Bengkulu

Menuju Pembelajaran  
Berkelanjutan



Penanggung Jawab :

Muhamad Amin

Plt. Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Tim Penyusun :

Didik Sudarsono (1), Muhammad Zulhamdani (1), Etty Tri Widyastuti (1),  
Sabar Budi Raharjo (2), Siswantari (2), Ibnu Salman (2)

(1) Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN

(2) Pusat Riset Pendidikan, BRIN

Ditujukan Kepada :  
Pemerintah Provinsi Bengkulu

## Ringkasan Eksekutif

*Pendidikan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Di Provinsi Bengkulu, berbagai tantangan masih membayangi kualitas pendidikan, seperti rendahnya kompetensi guru, belum link and Match Lulusan Pendidikan Dengan Dunia Usaha dan Dunia kerja, fasilitas pendidikan yang belum merata, minimnya integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta tingginya angka putus sekolah di sejumlah kabupaten. Policy paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut secara sistematis dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis data. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, data statistik regional, serta referensi kebijakan nasional dan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan mutu guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemerataan sarana pendidikan, perluasan akses teknologi, serta penguatan sistem retensi siswa di jenjang menengah, merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan menuju pembelajaran berkelanjutan di Bengkulu. Rekomendasi dalam paper ini ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan, pemerintah desa, lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta. Dengan kolaborasi multipihak dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, Provinsi Bengkulu berpotensi menjadi model dalam pengembangan pendidikan berkelanjutan di tingkat daerah.*

**Kata Kunci :** Pendidikan berkelanjutan; kompetensi guru; ketimpangan fasilitas; putus sekolah; Provinsi Bengkulu; kebijakan pendidikan; SDG 4

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat vital dalam menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilbury (2011), pendidikan tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan juga sebagai alat untuk membentuk pola pikir, nilai-nilai hidup, dan perilaku generasi penerus agar mampu menghadapi kompleksitas tantangan global di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Pentingnya peran tersebut tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4, yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat (UNESCO, 2017).

SDGs 4 menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, dengan sasaran agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan serta kesempatan belajar. Pencapaian target ini bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menuntut kontribusi aktif dari pemerintah daerah, termasuk Provinsi Bengkulu. Sebagai wilayah dengan keunikan geografis, sosial, dan ekonomi tersendiri, Provinsi Bengkulu memiliki posisi strategis dalam mendukung tercapainya SDG 4 secara nasional.

Di Provinsi Bengkulu, pendidikan yang bermutu tidak hanya akan mencetak sumber daya manusia unggul dari sisi akademik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan ketahanan sosial dan kemajuan pembangunan daerah. Pendidikan berkelanjutan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, mendorong inovasi lokal,

dan meningkatkan daya saing regional. Seperti dikemukakan oleh Sterling (2010), model pendidikan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada transfer pengetahuan, namun juga pada transformasi kesadaran peserta didik agar mereka mampu menjadi pelaku perubahan yang bertanggung jawab dalam komunitasnya. Menjadikan pendidikan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan strategis, khususnya bagi daerah seperti Provinsi Bengkulu yang tengah berupaya memperkuat daya saingnya di berbagai sektor.

Sejumlah program strategis telah diimplementasikan di Bengkulu untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan. Di antaranya adalah pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak yang bertujuan untuk mempercepat transformasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, digitalisasi sekolah mulai diperkuat melalui penggunaan platform Merdeka Mengajar dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Dukungan juga datang dari sektor akademik, khususnya dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Bengkulu dalam pelaksanaan riset dan pengembangan model pembelajaran berbasis komunitas.

Sejalan dengan hal tersebut, Suyanto (2020) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SDG 4 sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal dan peningkatan kapasitas pendidik di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menjadi sangat relevan.

Lebih lanjut, Abdullah (2021) menggarisbawahi bahwa transformasi peran pemerintah daerah dari sekadar pelaksana administratif menjadi fasilitator inovasi pendidikan merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu berfokus pada penguatan kapasitas institusi pendidikan, mengatasi ketimpangan antarwilayah, serta mengintegrasikan teknologi secara berkelanjutan dalam pembelajaran.

Dalam konteks ini, sinergi multipihak menjadi sangat penting. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan kalangan akademisi perlu dioptimalkan guna memperkuat intervensi daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDG 4. Peran Provinsi Bengkulu dalam mendukung pencapaian target SDG 4 bersifat strategis dan harus dioptimalkan melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan implementasi program pendidikan di tingkat lokal akan sangat menentukan tercapainya pendidikan berkualitas dan berkelanjutan secara nasional.

## B. LATAR BELAKANG DARI KEBIJAKAN

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. Namun, di Provinsi Bengkulu, berbagai tantangan struktural dan kultural masih menghambat untuk terwujudnya sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencangkup pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Bapperida Provinsi Bengkulu, 2025). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas

pendidikan di Provinsi Bengkulu, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan. Berdasarkan dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, ada beberapa tantangan dalam pembangunan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu, diantaranya: Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik/guru, belum *link and match* lulusan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia kerja (Iduka), fasilitas pendidikan yang belum merata, minimnya integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar, serta tingginya angka putus sekolah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang mencerminkan adanya permasalahan serius dalam tata kelola pendidikan Provinsi Bengkulu. Untuk itu, identifikasi masalah ini menjadi penting untuk merumuskan arah kebijakan yang tepat dan berbasis data guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Provinsi Bengkulu.

#### a. Rendahnya Kompetensi Guru

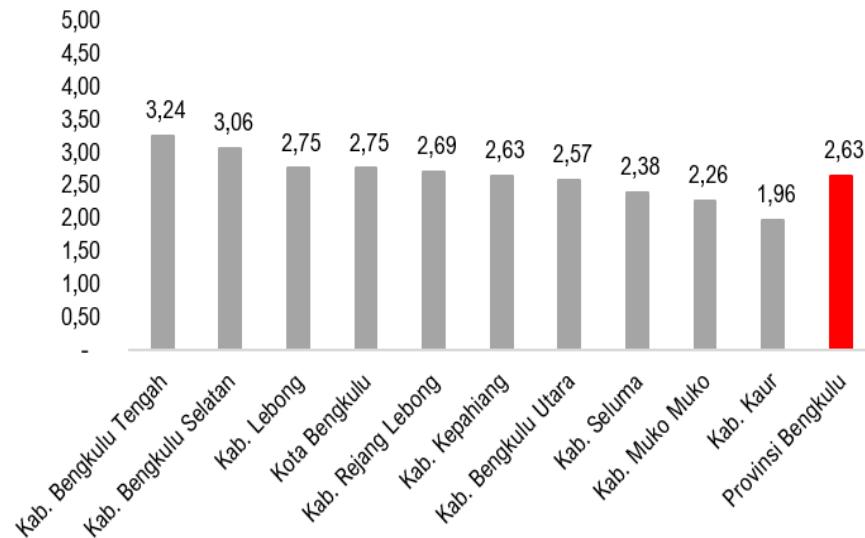
Mutu pendidik/guru menjadi komponen esensial dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas. Suyanto dan Jihad (2013) menegaskan bahwa seorang guru profesional harus memiliki pengetahuan yang mendalam, etika profesi yang kuat, serta komitmen untuk terus mengembangkan diri dalam komunitas profesi. Peningkatan kapasitas guru juga telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional.

Di Provinsi Bengkulu, persoalan kualitas guru masih menjadi isu sentral. Meskipun secara kuantitatif jumlah guru relatif mencukupi, namun kualitas profesional mereka belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan. Data dari Pokok Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2024, mencatat bahwa keberadaan guru dalam jumlah besar, namun tidak seluruhnya guru (pendidik) telah memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme yang ditetapkan ([data.bengkuluprov.go.id](http://data.bengkuluprov.go.id), 2023). Dampaknya, meskipun angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah Bengkulu cukup tinggi, kualitas pembelajaran masih belum optimal karena keterbatasan guru yang benar-benar kompeten secara pedagogis maupun profesional. Oleh karena itu, perbaikan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan karier, serta insentif profesional menjadi agenda mendesak untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Bengkulu.

Untuk meningkatkan kualitas (mutu) pendidikan, salah satu strategi yang dilakukan adalah peningkatan kualitas guru (Alifah, 2021). Rendahnya kompetensi guru di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu tantangan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, dimana sebagian besar guru menunjukkan kemampuan pedagogik dan profesional yang belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi regional yang menempatkan kompetensi mereka dalam kategori “sedang” hingga “kurang” (Putra dkk., 2021).

Kualitas tenaga pendidik/guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi dan keterampilan mengajar, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan berpikir kritis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu pembelajaran. Kualitas tenaga pendidik/guru dapat dianalisis dengan pendekatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) khususnya pada Pilar 6 Keterampilan melalui Indikator berpikir kritis dalam mengajar. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pengajaran mendorong siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah guru yang telah memperoleh sertifikat (provinsi dan kabupaten/kota) dengan total guru yang ada di wilayah tersebut. Indikator berpikir kritis dalam mengajar untuk Provinsi Bengkulu tahun 2024 memiliki skor 2,63 seperti yang

ditampilkan pada Gambar 1 dan tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia (total 38 provinsi) yang secara menyeluruh berada dalam rentang skor 2,48 – 4,09 (BRIN, 2025).



**Gambar 1.** Skor indikator berpikir kritis dalam mengajar tahun 2024 untuk Provinsi Bengkulu  
(Sumber : BRIN, 2025)

Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 (Tabel 1) menyebutkan bahwa persentase jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada satuan pendidikan SMA dan SMK masih kurang dari 50% dan tergolong rendah (Kemendikdasmen, 2025). Disisi lain, berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, target indikator outcome untuk presentase guru (pendidik) yang memiliki sertifikat pendidik pada urusan pemerintah bidang pendidikan adalah 75,0% pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak pendidik pada satuan pendidikan tertentu yang memiliki sertifikat pendidik di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

**Tabel 1.** Data persentase jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki kualifikasi pendidikan min. D4/S1, serta persentase siswa mengulang dan putus sekolah untuk Provinsi Bengkulu dan Nasional

Kategori	Bengkulu		Nasional	
	SMA	SMK	SMA	SMK
Jumlah Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik (orang)	1.762 (42,57%)	1.079 (36,47%)	136.456 (39,94%)	117.605 (36,03%)
Jumlah Pendidik dengan Kualifikasi Pendidikan Min. D4 atau S1 (orang)	4.107 (99,23%)	2.868 (96,92%)	337.106 (98,67%)	315.492 (96,65%)
Total Jumlah Pendidik (orang)	4.139	2.959	341.662	326.414
Jumlah Siswa	56.495	28.542	5.401.294	5.059.800
Persentase Siswa Mengulang	0,12%	0,21%	0,16%	0,27%
Persentase Siswa Putus Sekolah	0,09%	0,75%	0,12%	0,27%

(Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, salah satu penyiapan guru sebagai profesi adalah harus berkualifikasi D4 atau S1. Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa

persentase jumlah pendidik yang dengan kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu cukup tinggi dan melebihi nilai rata-rata nasional. Artinya, rata-rata kualifikasi pendidikan guru di Provinsi Bengkulu pada jenjang SMA dan SMK sudah cukup baik dengan mayoritas guru telah berijazah minimal D4 atau S1.

Disisi lain, berdasarkan Tabel 2, terlihat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih memiliki guru dengan kualifikasi pendidikan dibawah D4 atau S1 khususnya untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, seperti Kabupaten Rejang Lebong (3,33% atau 30 guru dari total 898 guru), Kabupaten Kaur (2,78% atau 12 guru dari total 488 guru) dan Kabupaten Kepahiang (2,22% atau 12 guru dari total 484 guru). Kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 bagi guru menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah. Pemberian beasiswa kuliah di Universitas bagi guru untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1.

**Tabel 2.** Data persentase guru SMA dan SMK dengan kualifikasi pendidikan dibawah D4 atau S1, rasio guru murid, siswa SMA dan SMK yang mengulang dan putus sekolah untuk Kab/Kota di provinsi Bengkulu

Kab/Kota	Persentase guru SMA dan SMK dengan kualifikasi Pendidikan dibawah D4 atau S1	Persentase siswa SMA dan SMK yang mengulang	Persentase siswa SMA dan SMK yang putus sekolah
Kab. Bengkulu Utara	0,85%	0,04%	0,24%
Kab. Rejang Lebong	3,33%	0,32%	0,03%
Kab. Bengkulu Selatan	1,63%	0,03%	0,07%
Kab. Muko-muko	1,04%	0,14%	0,21%
Kab. Kepahiang	2,20%	0,05%	0,02%
Kab. Lebong	1,70%	0,36%	0,00%
Kab. Kaur	2,78%	0,39%	0,44%
Kab. Seluma	1,33%	0,05%	0,01%
Kab. Bengkulu Tengah	2,11%	0,21%	0,26%
Kota Bengkulu	1,25%	0,24%	0,39%

(Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025)

Disamping itu, berdasarkan Tabel 1, terlihat persentase siswa yang putus sekolah dan mengulang. Secara umum, pesentase siswa SMA dan SMK yang mengulang kelas maupun putus sekolah lebih kecil dari rata-rata nasional, kecuali angka putus sekolah SMK yang mencapai 0,75%. Hal ini mengindikasikan banyaknya siswa SMK yang mengalami putus sekolah yang dikarenakan beberapa aspek mulai dari faktor ekonomi, siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan terutama kualitas tenaga pendidik di suatu daerah dalam mendidik siswa. Jika ditinjau dari kabupaten/kota, terlihat bahwa Kabupaten Kaur menjadi salah satu daerah dengan nilai persentase jumlah siswa SMA dan SMK yang mengulang (0,39%) dan putus sekolah (0,44%), diikuti Kabupaten Lebong (mengulang : 0,36%), dan Kota Bengkulu (putus sekolah : 0,39%).

Selain itu, pelatihan berkelanjutan yang semestinya menjadi solusi peningkatan kapasitas belum terlaksana secara sistematis dan merata, terutama di wilayah terpencil yang minim akses terhadap program pengembangan keprofesionalan. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar di kelas, menurunkan efektivitas pembelajaran, serta memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar daerah di provinsi. Oleh karena itu, tanpa intervensi kebijakan yang konkret dan terstruktur dalam penguatan pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal, upaya menuju pembelajaran berkelanjutan akan sulit dicapai.

**b. Belum *Link and Match* Lulusan Pendidikan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Kerja**

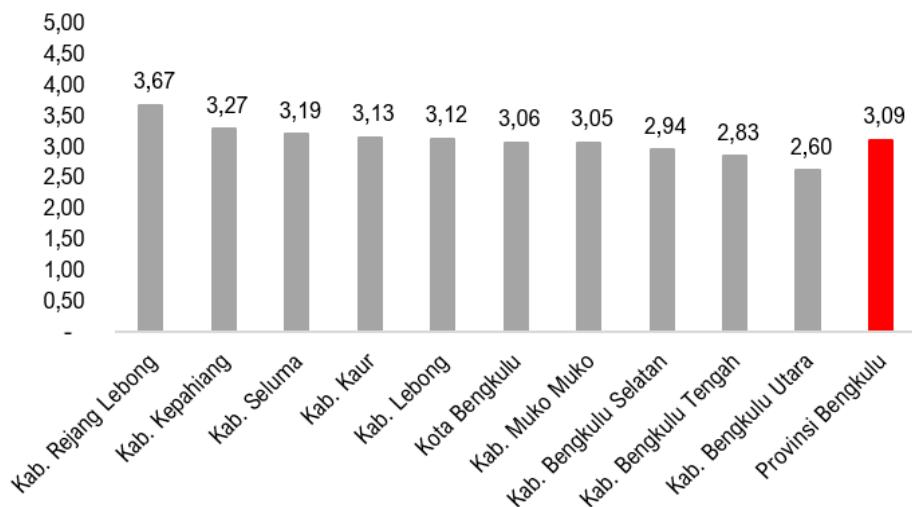
Permasalahan belum *link and match* lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha ini terlihat dari masih rendahnya kualitas lulusan Sekolah Kejuruan disebabkan oleh laboratorium dan sarana praktik yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan tenaga pendidikan yang kurang kompeten, serta pendidikan yang belum diarahkan pada *outcome skill*, kompetensi maupun *life skill*. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan sekolah menengah (SMK) yang mencapai 7,85% (Bapperida, 2025). Indikator ini digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Selain itu, berdasarkan data pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, pencari kerja dengan lulusan SMA/SMK masih mendominasi sekitar 52,7% dari total jumlah pencari kerja di Provinsi Bengkulu (BPS, 2024).

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2024-2029, terlihat bahwa salah satu isu strategis provinsi bengkulu adalah belum optimalnya strategi peningkatan ekonomi rakyat dan daya saing daerah. Selanjutnya, salah satu permasalahan yang ada dalam isu strategis tersebut yaitu rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif. Kurangnya sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem tenaga kerja yang kompetitif semakin memperlemah daya saing daerah.

Berdasarkan Data IDSD 2024, salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas pendidikan melalui penyerapan lulusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha adalah keterampilan lulusan pada Pilar 6 Keterampilan IDSD. Keterampilan lulusan adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana penduduk dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor bisnis. Indikator keterampilan lulusan ini berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan sektor bisnis terhadap tenaga kerja terampil (memiliki tingkat pendidikan menengah dan tinggi) di suatu wilayah. Indikator ini mengungkap sejauh mana sistem pendidikan dan pelatihan mampu menghasilkan SDM yang siap berkontribusi di pasar kerja.

Skor indikator keterampilan lulusan untuk Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah 3.09 seperti yang ditampilkan pada Gambar 2, dan masih dapat ditingkatkan (BRIN, 2025). Disisi lain, skor indikator keterampilan lulusan untuk Kab/Kota yang berada dibawah skor Provinsi Bengkulu diantaranya Kota Bengkulu (3,06), Kabupaten Mukomuko (3,05), Kabupaten Bengkulu Selatan

(2,94), Kabupaten Bengkulu Tengah (2,83), dan Kabupaten Bengkulu Utara (2,60). Semakin rendah tingkat pengangguran di kalangan lulusan terdidik, maka semakin kuat kualitas keterampilan tenaga kerja pada wilayah tersebut.



**Gambar 2.** Skor indikator keterampilan lulusan tahun 2024 untuk wilayah provinsi bengkulu  
(Sumber : BRIN, 2025)

### c. Fasilitas Pendidikan yang Belum Merata

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Studi oleh Anatasya (2021) menunjukkan bahwa tersedianya fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran secara signifikan memengaruhi pencapaian hasil belajar peserta didik. Hal serupa juga ditegaskan oleh Prihantini, Effendi, dan Revika (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana secara sistematis dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi proses pendidikan yang bermakna. Kondisi di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan kualitas infrastruktur dasar pendidikan. Banyak sekolah masih kekurangan ruang belajar yang layak, laboratorium yang memadai, serta teknologi pendukung pembelajaran modern.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kondisi ruang kelas yang berstatus baik di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 hanya 48,12% untuk SMA dan 43,85% untuk SMK. Nilai-nilai tersebut jauh lebih rendah dari nilai rata-rata nasional kondisi ruang kelas yaitu 60,28% untuk SMA dan 64,34% untuk SMK seperti yang ditampilkan pada Tabel 3. Yang perlu di cermati adalah tinggi persentase kondisi ruang kelas dengan tingkat rusak sedang dan berat untuk SMK di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal pembangunan infrastruktur dasar khususnya ruang kelas SMK yang banyak mengalami kerusakan.

Jika ditelaah pada tingkat Kab/Kota, terlihat ada beberapa daerah yang memiliki kondisi ruang kelas SMA dan SMK dalam kondisi baik dengan persentase terendah, seperti Kabupaten Kepahiang (29,16%), Kabupaten Kaur (33,28%) dan Kabupaten Lebong (36,28%). Kondisi ruang kelas yang baik tentu akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar di

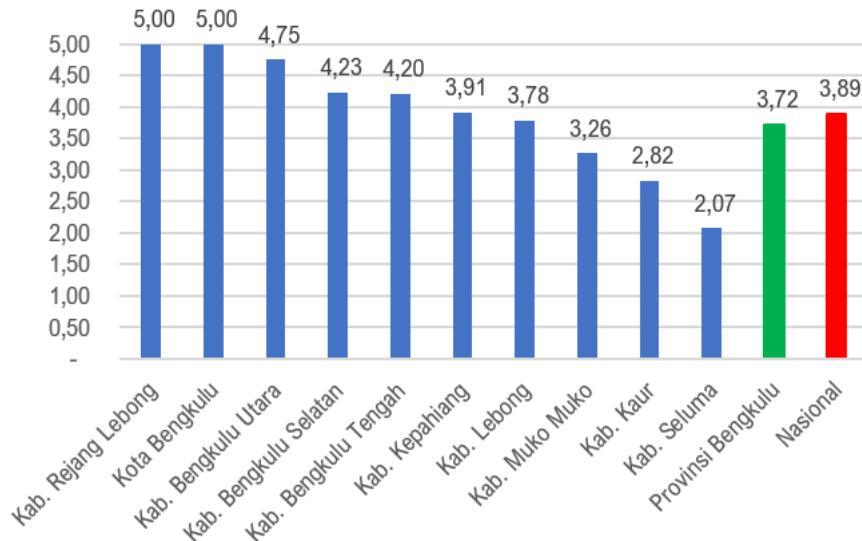
sekolah dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas (mutu) pendidikan di Provinsi Bengkulu.

**Tabel 3.** Rekap data kondisi ruang kelas berstatus baik dan rusak untuk wilayah Bengkulu

Kategori	Bengkulu		Nasional	
	SMA	SMK	SMA	SMK
Kondisi Ruang Kelas - Baik	48,12%	43,85%	60,28%	64,34%
Kondisi Ruang Kelas - Rusak Ringan	27,04%	24,76%	21,00%	24,98%
Kondisi Ruang Kelas - Rusak Sedang	20,68%	22,97%	12,55%	7,72%
Kondisi Ruang Kelas - Rusak Berat	4,16%	8,43%	6,17%	2,96%

(Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025)

Sementara itu, berdasarkan data IDSD Tahun 2024, kualitas jalan di daerah dapat ditinjau dari skor indikator kualitas infrastruktur jalan pada Pilar 2 Infrastruktur. Pada Gambar 3, diketahui bahwa skor indikator kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu sebesar 3,72, lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 3,89 serta tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia (total 38 provinsi) yang secara menyeluruh berada dalam rentang skor 2,15 – 5,00. Disisi lain, ada beberapa daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki skor indikator kualitas infrastruktur yang rendah, meliputi yaitu Kabupaten Seluma (2,07), Kabupaten Kaur (2,82), Kabupaten Mukomuko (3,26). Kualitas jalan ini menjadi penting karena beberapa sekolah di daerah wilayah Provinsi Bengkulu memiliki jarak yang cukup jauh dari desa. Untuk itu, kualitas infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan tingkat partisipasi atau kemauan siswa untuk bersekolah pada jenjang berikutnya.



**Gambar 3.** Skor indikator kualitas infrastruktur jalan tahun 2024 untuk wilayah provinsi bengkulu

(Sumber : BRIN, 2025)

Permasalahan lain yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu adalah adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah kota umumnya telah dilengkapi dengan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, akses internet, dan sarana pendukung lainnya, sementara itu banyak sekolah di desa-desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti

gedung yang tidak memadai, minimnya fasilitas sanitasi, serta kurangnya alat peraga dan media pembelajaran. Sementara itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Bengkulu masih signifikan, di antaranya karena minimnya fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang tidak merata. Ketidakseimbangan ini tidak hanya memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar-wilayah, tetapi juga membatasi peluang siswa di desa untuk memperoleh pengalaman belajar yang setara dan bermakna.

#### d. Minimnya Integrasi Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar

Meskipun era digital menuntut transformasi pendidikan berbasis teknologi, namun proses belajar-mengajar di Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi teknologi secara efektif. Data dari IDSD 2024 khususnya indikator penggunaan internet pada Pilar 3 menunjukkan bahwa hanya skor indikator penggunaan internet untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah 4,02. Nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata skor provinsi yang ada sumatera yaitu 4,24. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang menggunakan internet untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan layanan digital lainnya. Indikator penggunaan internet ini diukur dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Internet adalah kunci utama dalam pemanfaatan teknologi, yang mendukung peningkatan daya saing daerah melalui akses informasi dan digitalisasi.

Minimnya integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar terlihat dari data proporsi sekolah yang mengakses internet maupun komputer. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terlihat bahwa masih rendahnya proporsi SMK baik yang memiliki akses internet maupun memiliki akses komputer yaitu masing-masing 85,44% dan 65,05%. Nilai tersebut ternyata masih jauh dibawah rata-rata nasional seperti yang terlihat pada Tabel 4. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan khususnya pada sekolah vokasi di Provinsi Bengkulu dalam hal prasarana untuk mengakses internet dan komputer untuk meningkatkan proses belajar mengajar.

**Tabel 4.** Data jumlah SMK di Provinsi Bengkulu yang memiliki akses internet dan akses komputer

Kategori	Bengkulu	Nasional
Proporsi SMK yang memiliki akses internet	85,44%	91,32%
Proporsi SMK yang memiliki akses komputer	65,05%	77,13%

(Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025)

Sementara itu, penelitian lainnya mengemukakan bahwa persentase pelajar yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Provinsi Bengkulu adalah sekitar 83,13 %. Namun, angka ini masih sedikit dibanding provinsi lainnya dan belum mencerminkan kualitas akses atau penggunaan untuk pembelajaran.

Di samping itu, di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma terdapat sekolah yang masih menghadapi masalah kekurangan daya listrik dan sejumlah sekolah yang belum memiliki atau hanya memiliki jaringan internet sangat lemah yang secara langsung menghambat proses digitalisasi pembelajaran. Hal ini juga diperkuat oleh data IDSD 2024

untuk nilai indikator penggunaan internet yang rendah di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma yaitu masing-masing 2,63, 2,53, dan 2,11.

Banyak sekolah masih beroperasi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai (akses internet, perangkat digital, listrik stabil), dan literasi digital guru serta siswa juga terbatas. Akibatnya, teknologi informasi ini hanya digunakan sebagai alat bantu administratif, bukan sebagai instrumen pembelajaran aktif dan kreatif. Kondisi ini berdampak langsung pada kurangnya inovasi pembelajaran, terbatasnya akses terhadap sumber belajar global, serta kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang masih lemah. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan digital tersebut akan terus memperlebar jurang kualitas pendidikan antarwilayah di Provinsi Bengkulu.

**e. Tingginya Angka Putus Sekolah.**

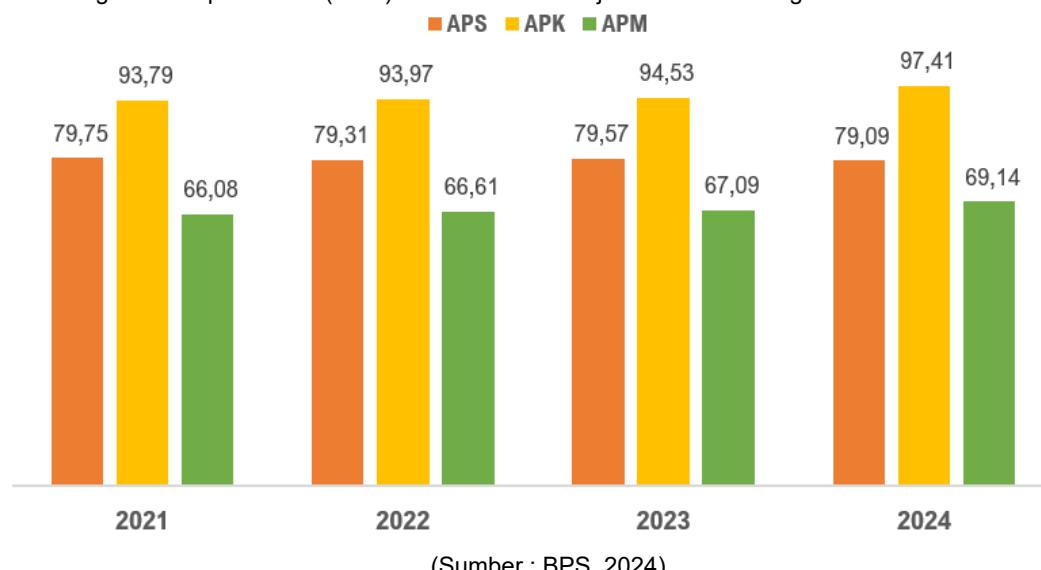
Akses terhadap pendidikan yang setara merupakan fondasi keadilan sosial dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), akses pendidikan dapat dilihat dari tiga dimensi: akses meluas (ketersediaan layanan pendidikan), akses merata (pemerataan antarwilayah), dan akses berkeadilan (tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ekonomi, atau lokasi geografis). Namun, kondisi di Provinsi Bengkulu masih menunjukkan kesenjangan akses yang cukup signifikan.

Berdasarkan data BPS, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas Tahun 2023 di Kota Bengkulu telah mencapai 11,83 tahun, setara dengan tingkat kelas XI SMA. Sebaliknya, di kabupaten-kabupaten lain seperti Seluma (8,13 tahun), Bengkulu Utara (8,11 tahun), dan Bengkulu Tengah (7,51 tahun), angka-angka tersebut jauh lebih rendah (BPS, 2024). Disparitas ini menunjukkan bahwa siswa-siswi di daerah terpencil atau perdesaan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atau tingginya angka putus sekolah pada daerah perdesaan atau terpencil, baik karena hambatan geografis, ekonomi, maupun keterbatasan fasilitas. Akses yang tidak merata juga mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hal mutu pendidikan yang diterima, memperkuat siklus ketimpangan sosial antarwilayah.

Gambar 4 menampilkan grafik angka partisipasi sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun di Provinsi Bengkulu pada rentang tahun 2021-2024. APS untuk penduduk usia 16-18 tahun Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebesar 79,09% (BPS, 2024), dimana nilai tersebut mengalami fluktuatif dan cenderung menurun dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2024 mencapai 69,14%. Hal tersebut dimaknai bahwa setiap 100 penduduk dengan usia 16-18 tahun, maka 69 diantaranya bersekolah pada tingkat menengah atas, sedangkan sisanya dimungkinkan tidak melanjutkan sekolah atau sudah bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Hal ini juga diperkuat dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2024 yang mencapai 97,41%. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ada sebanyak 28,27% penduduk dengan usia dibawah 16 tahun atau penduduk dengan usia diatas 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini dapat terjadi karena ada murid yang terlalu cepat masuk sekolah dasarnya ataupun murid yang terlambat dalam memulai sekolah atau bahkan ada murid yang tidak naik kelas sehingga harus mengulang pada tingkat kelas sebelumnya.

**Gambar 4.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur 16-18 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/sederajat di Provinsi Bengkulu tahun 2021-2024



(Sumber : BPS, 2024)

Tingginya angka putus sekolah di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu menjadi indikator serius terhadap kegagalan sistem pendidikan dalam menjamin akses yang setara dan kualitas yang memadai. Sebagai contoh, di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat ada 1.857 anak berusia antara 13 hingga 17 tahun yang putus sekolah karena faktor kemiskinan dan lokasi geografis yang sulit dijangkau. Sementara di tingkat provinsi, data menunjukkan bahwa APM (Angka Partisipasi Murni) anak usia SMA (16–18 tahun) hanya 69,14 % artinya sekitar 30,86% anak usia SMA di provinsi Bengkulu tidak melanjutkan ke jenjang tersebut dari SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat akses ke sekolah, banyak anak yang terhenti sebelum menyelesaikan jenjang menengah atas, terutama di kabupaten yang terpencil ataupun dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang pada akhirnya melemahkan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kelima tantangan ini saling berkaitan dan harus diselesaikan secara komprehensif. Guru yang profesional membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, dan siswa dari seluruh wilayah harus mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas. Untuk itu, diperlukan kebijakan terpadu yang menyasar penguatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan sarana prasarana pembelajaran, sebagai prasyarat membangun sistem pendidikan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu sekaligus dapat selaras dengan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, *policy paper* ini disusun sebagai kontribusi analitis dan solutif dalam merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu dengan batasan bahwa tingkat pendidikan yang dianalisis adalah jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas SMA dan SMK.

## C. PERNYATAAN KEBIJAKAN

### a. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan yang dibahas adalah peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Bengkulu. Tujuan ini didasarkan pada tantangan kompleks yang

dihadapi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, dalam hal kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Salah satu strategi peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Bengkulu adalah meningkatkan jumlah tenaga pendidik (guru) yang memiliki sertifikasi pendidikan, meningkatkan keterampilan lulusan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan fasilitas pendidikan yang merata.

Peningkatkan jumlah guru yang memiliki sertifikasi sejalan dengan indikator *outcome* persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik yang termuat dalam program pendidik dan tenaga kependidikan pada dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Selain itu, Penurunan angka putus sekolah dilakukan dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Bengkulu dalam aspek jumlah anak usia 16-18 tahun untuk bersekolah di jenjang pendidikan SMA sederajat, yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu. Hal ini juga sejalan dengan indikator *outcome* persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) yang termuat pada program pengelahan pendidikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

Secara spesifik, arah kebijakan yang dibuat berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru, peningkatan lulusan vokasi yang relevan dan peningkatan akses pemerataan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Arah kebijakan tersebut selaras dengan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait pemenuhan standar nasional pendidikan dan menyediakan tenaga pendidik (guru) berkualitas.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, terkait peningkatan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Visi, Misi dan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025-2029, terkait peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

#### **b. Profil Kebijakan yang Dibahas**

Profil kebijakan yang dibahas berfokus pada strategi peningkatan kualitas (mutu) dan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Bengkulu, dengan menyoroti empat isu utama yang menjadi tantangan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Bengkulu, meliputi yaitu :

- Peningkatan kompetensi guru;
- Peningkatan keterampilan lulusan pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan dunia kerja;
- Peningkatan fasilitas pendidikan yang lebih merata
- Penurunan angka putus sekolah

#### **c. Aktor Kunci Kebijakan**

Aktor kunci kebijakan yang terlibat dalam peningkatan kualitas dan akses pemerataan pendidikan di Provinsi Bengkulu, meliputi :

- Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) : bertugas untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sesuai peraturan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terlibat dalam penetapan program prioritas nasional seperti wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia.
- Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu) : bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dimana Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas di Provinsi Bengkulu.
- Dunia Usaha dan Dunia Kerja (Iduka) : Aktor kunci dalam konteks pendidikan vokasi (link and match). Keterlibatan Iduka penting untuk kolaborasi, pengembangan kurikulum SMK berbasis kompetensi, dan penyerapan lulusan pendidikan khususnya lulusan SMK. Selain itu, Iduka dapat sebagai mitra untuk peningkatan kompetensi guru SMK melalui pelatihan dan magang di Industri.
- Guru (Tenaga Pendidik): Menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas (mutu) pendidikan, dimana peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- Lembaga pelatihan guru : Mitra peningkatan kompetensi tenaga pengajar (guru).
- Masyarakat/Orang tua : Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat memiliki peran signifikan terhadap partisipasi pendidikan seperti putus sekolah dan pernikahan dini.

## D. PEMBAHASAN

Untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang tersedia. Analisis ini mencakup kebijakan yang telah berjalan, serta pertimbangan terhadap alternatif solusi yang realistik dan kontekstual. Dengan pendekatan berbasis data dan bukti empiris, analisis kebijakan bertujuan memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis yang mampu menjawab tantangan pendidikan secara berkelanjutan.

### 1. Rendahnya Kompetensi Guru

Pengembangan kompetensi guru merupakan suatu kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kompetensi guru yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Kompetensi ini mencakup empat aspek utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Rendahnya kualitas tenaga pendidik (guru) mengindikasikan belum optimalnya tingkat kompetensi pedagogis dan profesional. Berdasarkan hasil evaluasi internal dan sejumlah studi, sebagian besar guru di wilayah Bengkulu masih menunjukkan performa yang belum optimal, terutama dalam aspek pedagogik dan profesional. Penelitian Pujiyanto (2014) menemukan bahwa hanya sekitar 46,60% guru di Kota Bengkulu yang memenuhi kriteria kompetensi profesional secara memadai.

Rendahnya kompetensi guru berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang tidak menguasai pendekatan pedagogi modern cenderung menggunakan metode

konvensional yang pasif, tidak kontekstual, dan kurang memotivasi siswa. Akibatnya, hasil belajar siswa menjadi stagnan, dan kesenjangan prestasi antarwilayah semakin melebar. Selain itu, lemahnya kompetensi guru juga berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah dan rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Rendahnya kompetensi guru di Provinsi Bengkulu tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan individual, tetapi juga sistemik terutama minimnya pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan relevan.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih banyak guru yang belum tersertifikasi dan belum mengikuti pelatihan berkelanjutan secara rutin. Hal ini juga diperkuat dengan data persentase tenaga pendidik (guru) yang memiliki sertifikat pendidik di SMA dan SMK Provinsi Bengkulu yang masih kurang dari 50% dan data skor indikator berpikir kritis dalam mengajar (IDSD 2024) yang rendah yaitu 2,63. Disisi lain, juga masih terdapat tenaga pendidik (guru) khususnya jenjang pendidikan SMK dengan kualifikasi pendidikan dibawah D4 atau S1 dengan persentase 3,08%.

Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan program sertifikasi guru yang berfokus pada meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional, sesuai dengan amanat dari Pemendiknas Nomor 16 Tahun 2017. Program sertifikasi guru ini diharapkan memiliki kontribusi yang nyata dalam peningkatan pengetahuan pedagogis, penguasaan materi dan performa mengajar pada guru (Reza dkk, 2024). Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkala dan memberikan insentif khusus dapat mendorong pendidikan yang lebih bermutu dan merata di seluruh daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan program sertifikasi guru dengan menambahkan kegiatan baru dan memperluas program untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta guru untuk dapat berlatih dan belajar. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelatihan mengajar terhadap profesionalitas guru (Rakib dkk, 2017). Disisi lain, peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi juga dapat mendorong para guru untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai pengakuan atas profesionalisme guru.

Program sertifikasi guru perlu dirancang agar lebih berorientasi pada kinerja dan terintegrasi secara penuh dengan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dan juga, guru dapat proaktif dalam mengikuti pelatihan, seminar, dan lokakarya yang relavan dengan bidang pendidikan mereka. Kebijakan pelatihan guru harus diarahkan pada model yang berbasis kebutuhan lokal, berkelanjutan, dan didukung oleh teknologi, serta dilengkapi dengan insentif dan monitoring yang tepat.

Peran dari komunitas seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai forum formal maupun informal untuk meningkatkan profesionalitas guru melalui berbagi praktik terbaik dan memecahkan masalah pembelajaran secara kolaboratif (Bastomi, 2025). Integrasi program pelatihan dengan penguatan KKG, MGMP dan KKKS juga menjadi kunci dalam membangun komunitas pembelajar yang produktif di kalangan guru. Semua ini memungkinkan guru untuk berbagi keahlian satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kelas pada proses mengajar.

Keterlibatan Balai Guru Penggerak (BGP) Bengkulu dalam membentuk komunitas belajar juga menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan inovasi di antara para guru (BGP Bengkulu, 2023). Penting juga untuk mendorong kolaborasi guru melalui komunitas belajar sebagai pusat pengembangan, karena model ini terbukti lebih efektif dan relevan bagi guru. Pengembangan profesional guru yang diintegrasikan ke dalam ekosistem kerja sehari-hari dapat menciptakan platform kolaborasi dan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh satuan pendidikan dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai platform digital belajar mengajar secara optimal untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengatasi berbagai permasalahan. Guru diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pentingnya kemandirian belajar melalui PMM. PMM diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran di kelas. Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian guru sudah efektif dalam menggunakan teknologi melalui penggunaan PMM tersebut, khususnya bagi guru-guru yang berusia muda (Kurniawan dkk, 2025). Untuk itu, diperlukan dorongan untuk mengadopsi PMM agar dapat dengan menyediakan dukungan teknis dan pendampingan yang lebih terstruktur dalam pelatihan literasi digital di tingkat sekolah.

Selain menggunakan PMM, pelatihan bagi guru dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik pembelajaran yang dapat berfokus untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mempersonalisasi pembelajaran, dan melakukan asesmen yang efektif. Pemanfaatan teknologi ini harus didorong untuk membantu guru dalam merancang pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Peran teknologi kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk mentransformasi peran guru dari pemberi informasi menjadi fasilitator pembelajaran.

## **2. Belum *Link and Match* Lulusan Pendidikan dengan Iduka**

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi, yaitu meliputi : 1) Sinkronisasi kurikulum SMK dengan tuntutan Iduka (Dunia usaha dan Dunia Kerja) belum optimal, dimana sebagian jurusan/konsentrasi keahlian di SMK kurang sesuai dengan potensi atau kebutuhan di daerah; 2) Kolaborasi dengan industri/swasta masih lemah; 3) Terdapat Guru SMK yang memiliki kemampuan akademik dan pengalaman praktis yang belum relevan, sesuai varian jurusan di SMK; dan 4) Pengguna lulusan SMK (yaitu Iduka) memprioritaskan kemampuan *soft skill* (seperti beradaptasi, berpikir kritis, kreatif/inovatif, komunikasi, kolaborasi, & jujur), namun lulusan SMK cenderung lemah dalam kemampuan ini (de Ree, dkk. 2017).

Kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan industri merupakan elemen kunci dalam peningkatan keterampilan lulusan. Kebijakan *link and match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri dan dunia kerja merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan keterampilan lulusan khususnya untuk lulusan SMK agar terciptanya relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. World Bank (2020) menegaskan bahwa *link and match* pendidikan-industri menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran terdidik. Sebagai contoh, program kelas industri yang tercipta dari hasil kolaborasi dengan dunia industri dapat ditujukan bagi siswa SMK melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta. Selain itu,

kolaborasi tersebut juga dapat merevitalisasi sekolah menengah kejuruan untuk memastikan keselarasan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja (Dinas Pendidikan Sumatera Barat, 2023).

Data proporsi jumlah kerjasama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah yaitu sebesar 3,04 dimana ada sekitar 317 kerjasama dengan jumlah sekolah vokasi sebanyak 103 sekolah. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan proporsi jumlah kerjasama yang tertinggi yaitu sebesar 25,34 dimana ada 5.374 kerjasama dengan jumlah sekolah vokasi sebanyak 212 sekolah, kemudian diikuti dengan Provinsi Kalimantan Timur dengan proporsi jumlah kerjasama sebesar 18,58 dimana ada 4.031 kerjasama dengan jumlah sekolah vokasi sebanyak 217 sekolah.

Disamping itu, kualitas lulusan SMK tidak akan meningkat secara signifikan tanpa terlebih dahulu meningkatkan kualitas guru dan pengajarnya. Dengan memberdayakan guru SMK untuk meningkatkan keterampilan tingkat magister yang relevan dengan kebutuhan industri, maka secara tidak langsung menciptakan efek domino yang akan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten secara berkelanjutan di masa depan. Peningkatan kompetensi atau kapasitas tenaga pengajar SMK telah diterapkan di Provinsi Riau dimana Politeknik Caltex Riau (PCR) meluncurkan Program Magister (S2) Terapan Teknik Komputer yang secara spesifik menargetkan guru-guru SMK dan Aparatur Sipil Negara. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di tingkat yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru di SMK, khususnya di bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar global, seperti teknologi informasi, pariwisata, atau energi terbarukan.

Selanjutnya, kemampuan *soft skill* yang penting diperlukan di dunia industri dan dunia kerja, diantaranya beradaptasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikasi, kolaborasi dan jujur, sebagai prasyarat penting untuk bersaing di dunia kerja. Membentuk kemampuan *soft skill* perlu waktu, dan dilakukan baik pada lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan iduka dan masyarakat. Selain itu, membentuk *soft skill* juga dapat melalui buku teks pelajaran. Program pelatihan *soft skill* dapat diterapkan secara eksplisit dan wajib bagi semua lulusan SMK dimana tidak hanya harus mencakup keterampilan dasar, tetapi juga berpikir kritis, analisis data, kreatif/inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Program ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum wajib untuk SMK.

### **3. Fasilitas pendidikan yang belum merata**

Salah satu hambatan signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu adalah ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu terdapat sejumlah desa/kelurahan yang belum memiliki fasilitas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar atau menengah. Misalnya, dalam data Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ditemukan bahwa tidak semua desa di kabupaten terpencil sudah memiliki SD, SMP atau SMK/MA setempat. Lebih spesifik, laporan menyebutkan bahwa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu, sebanyak 171 desa

(12,75 %) tercatat masih belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Akibat kondisi ini, anak-anak di desa harus menempuh jarak lebih jauh ke sekolah, atau bahkan terpaksa putus sekolah karena fasilitas lokal tidak tersedia atau sangat terbatas. Ketimpangan ini memperkuat jurang akses pendidikan antara kota dan desa, yang pada gilirannya memengaruhi rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia (IPM) pendidikan di wilayah pedesaan yang relatif rendah dibandingkan kota. Sebagai contoh, dalam kajian "Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Bengkulu" tercatat bahwa rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 baru mencapai 8,29 tahun yang setara kelas dua SMP.

Dengan demikian, kondisi fasilitas yang belum merata menjadi faktor struktural yang harus diatasi dalam kebijakan pendidikan provinsi, agar pendidikan inklusif dan pembelajaran yang berkelanjutan menjadi nyata bagi seluruh anak, tak hanya yang di kota.

Disamping itu, kendala yang sering kali dihadapi lainnya adalah kesulitan untuk menarik dan mempertahankan guru yang profesional dan berpengalaman pada daerah/desa tertinggal dan terpelosok (Idris, 2025). Keterbatasan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang kurang memadai, membuat banyak guru enggan untuk ditempatkan di daerah tersebut. Untuk itu, kebijakan insentif seperti tambahan gaji, tunjangan khusus, dan fasilitas yang memadai digunakan untuk menarik dan mempertahankan guru-guru yang berkualitas untuk tinggal di daerah tertinggal. Penempatan tenaga pendidik yang adil dan terencana juga harus dijalankan agar tidak terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Vozovsky, 2023).

#### **4. Minimnya Integrasi Teknologi dalam Proses Belajar-Mengajar di Bengkulu**

Meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran abad ke-21, banyak sekolah di Provinsi Bengkulu yang masih menghadapi hambatan serius dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar-mengajar secara optimal. Salah satu indikatornya adalah laporan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki akses internet yang memadai atau perangkat TIK yang memadai untuk guru dan siswa. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan TIK telah diberikan, guru-guru senior masih mengalami kesulitan (gap-teknologi) dan infrastruktur jaringan belum menjangkau seluruh ruang kelas.

Dari sisi makro, data TIK dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu menyebut bahwa gambaran TIK di provinsi Bengkulu masih menunjukkan kondisi TIK yang belum optimal untuk mendukung seluruh aspek pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran: siswa dan guru sering kali hanya mengandalkan metode tradisional meskipun seharusnya telah tersedia peluang pembelajaran daring atau hibrida. Implikasi dari kondisi ini sangat signifikan yaitu proses pembelajaran menjadi kurang adaptif terhadap konteks digital, kesempatan siswa untuk mengeksplorasi bahan belajar interaktif atau berbasis daring terbatas, serta guru-guru tidak selalu siap memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kompetensi pembelajaran. Dengan demikian, walaupun ada upaya pelatihan, integrasi teknologi masih sebatas inisiasi, belum masuk ke tahap pemanfaatan sistematis dan merata di Provinsi Bengkulu.

## **5. Tingginya angka putus sekolah di beberapa kabupaten**

Tingginya angka putus sekolah masih menunjukkan persoalan yang cukup signifikan di Provinsi Bengkulu, yang pada gilirannya menghambat usaha menuju pembelajaran yang berkelanjutan. Data terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa pada tahun 2023 jumlah siswa yang putus sekolah di tingkat SD di Provinsi Bengkulu adalah 202 orang, tingkat SMP 22 orang, dan tingkat yang lain 17 orang. Selain itu, di tingkat kabupaten, misalnya di Kabupaten Bengkulu Utara, tersedia dataset spesifik yang menunjukkan rasio persentase angka putus sekolah (APS) pada jenjang SMA/SMK/MA yang dapat diunduh sebagai bentuk *real-time monitoring*. Analisis implikasi terhadap tingginya angka putus sekolah di Provinsi Bengkulu menunjukkan beberapa hal:

- a) Usia krusial. Penurunan APM dari SD ke SMP mengindikasikan bahwa periode transisi antar jenjang menjadi momen kritis bagi anak-anak di Bengkulu untuk mengalami *drop-out* atau tidak melanjutkan sekolah.
- b) Disparitas antar kawasan. Walaupun data provinsi menunjukkan gambaran umum, fakta adanya dataset khusus kabupaten (seperti Bengkulu Utara) mengindikasikan bahwa angka putus sekolah kemungkinan lebih tinggi di wilayah yang lebih terpencil atau kurang berinfrastruktur, sehingga provinsi secara keseluruhan merah muda namun kabupaten tertentu mungkin merah tua.
- c) Korelasi dengan faktor struktural. Penurunan besar tersebut biasanya terkait dengan faktor eksternal: kondisi ekonomi keluarga, akses fisik ke sekolah, kualitas sekolah dan guru, serta dukungan kebijakan untuk menjaga agar anak tetap sekolah. Karena satu dari empat anak tidak melanjutkan ke SMA, maka sisi akses dan retensi perlu diperkuat.
- d) Dampak jangka panjang. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan akan memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan sumber daya manusia lokal, menghambat pencapaian IPM dan daya saing daerah, serta memperbesar risiko kemiskinan antar generasi.

Disisi lain, kondisi ekonomi (kemiskinan dan keharusan bekerja) dan budaya masyarakat (pernikahan dini) menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan menengah, terutama bagi perempuan. Di Provinsi Bengkulu, faktor ekonomi dan budaya masyarakat memiliki peran yang cukup tinggi terhadap banyaknya siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama di balik tingginya angka putus sekolah. Di Kota Bengkulu, faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama mengapa hampir sebanyak 3.519 Anak di Bengkulu yang belum bersekolah, dikarenakan keharusan untuk bekerja (Ariwibowo, 2025). Selain itu, di banyak daerah tertinggal, tingkat kemiskinan yang tinggi membuat banyak orang tua lebih memilih anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan keluarga daripada mengutamakan pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah, dan sering kali pendidikan dianggap tidak esensial dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya (Idris, 2025).

Kasus pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup tinggi, yang berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya kualitas hidup perempuan di usia produktif (Bapperida, 2025). Berdasarkan data BPS Tahun 2024, terlihat bahwa proporsi perempuan berstatus kawin/hidup bersama sebelum 18 tahun pada tahun 2024 adalah 6,3,

dimana nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,9. Tingginya angka pernikahan dini di Provinsi Bengkulu ikut memengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan menengah atas, terutama bagi perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2020) menekankan bahwa perkawinan anak berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah, sehingga intervensi pencegahan perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan.

## E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kebijakan yang telah dipaparkan, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif, berbasis data, serta sesuai dengan konteks lokal Provinsi Bengkulu. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, melalui penguatan kapasitas guru, kesesuaian keterampilan lulusan dengan iduka, pemerataan fasilitas pendidikan, integrasi teknologi pembelajaran, serta upaya menurunkan angka putus sekolah. Rekomendasi disusun dengan pendekatan multipihak dan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, Perguruan tinggi lokal, maupun Pemerintah Desa agar intervensi yang dilakukan bersifat kolaboratif dan berdaya guna dalam jangka panjang.

### 1. Rendahnya Kompetensi Guru

#### a) Mewajibkan Pelatihan Berkelanjutan berbasis Kompetensi Lokal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu menyusun dan menerapkan *roadmap* pelatihan guru berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang relevan dengan kebutuhan spesifik daerah. Pelatihan tenaga pendidik/guru harus mencakup aspek pedagogik, profesional, teknologi pembelajaran, dan literasi numerasi.

#### b) Pembentukan Komunitas Praktik Guru (*Professional Learning Communities - PLC*)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu memfasilitasi terbentuknya forum guru di setiap sekolah dan gugus kerja untuk saling berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan secara *hybrid* (tatap muka dan daring) untuk menjangkau daerah terpencil.

#### c) Penguatan Sistem Supervisi dan Monitoring Kinerja Guru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap peningkatan kompetensi guru pasca pelatihan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar pemberian insentif, mutasi, dan promosi berbasis kinerja.

#### d) Kolaborasi dengan LPTK dan Perguruan Tinggi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat melibatkan universitas lokal seperti Universitas Bengkulu dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam menyusun modul pelatihan, penelitian tindakan kelas, dan program sertifikasi kompetensi mikro.

#### e) Penyediaan Insentif bagi Guru di Daerah Terpencil dan Berkinerja Tinggi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan insentif finansial dan non-finansial (akses beasiswa, prioritas pelatihan luar daerah) bagi guru yang menunjukkan peningka-

tan kompetensi signifikan. Insentif juga diarahkan kepada guru yang aktif menjadi mentor di komunitas praktik.

f) Digitalisasi Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu dapat mengembangkan platform daring berbasis lokal seperti *Learning Management System* (LMS) provinsi atau kabupaten/kota yang memuat materi pelatihan, video praktik baik, dan ruang diskusi antar guru.

## 2. Belum *Link and Match* Lulusan Pendidikan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Kerja

a) Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan dan Magang di Industri

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat berkolaborasi dengan Industri/Swasta dalam rangka peningkatan kompetensi atau kapasitas tenaga pendidik/guru untuk meningkatkan keterampilan tingkat magister yang relevan dengan kebutuhan industri. Peningkatan kualitas pengajar adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak berkelanjutan pada kualitas lulusan.

b) Kerjasama dengan Industri dan Swasta

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga dapat berkolaborasi dengan Industri dan Swasta dalam rangka meningkatkan keterampilan lulusan khususnya lulusan SMK agar terciptanya relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi/kerjasama tersebut dapat merevitalisasi sekolah menengah kejuruan untuk memastikan keselarasan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

c) Habituasi *Soft Skill* Sesuai Kebutuhan Industri dan Dunia Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat memasukkan pengajaran program pelatihan kemampuan *soft skill* yang penting diperlukan di dunia industri dan dunia kerja (Iduka), diantaranya beradaptasi, berpikir kritis, kreatif/inovatif, komunikasi, kolaborasi dan jujur, sebagai prasyarat penting untuk bersaing di dunia kerja. Program ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum wajib untuk SMK.

## 3. Fasilitas Pendidikan yang Belum Merata

Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perdesaan dan terpencil dengan mengintegrasikan kebijakan afirmatif berbasis kebutuhan lokal. Rekomendasi ini bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari strategi jangka panjang mewujudkan pembelajaran yang berkelanjutan dan inklusif.

a) Alokasikan Anggaran Dari Dana Pembangunan Pendidikan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu mengalokasikan anggaran minimal 30% dari dana pembangunan pendidikan daerah untuk perbaikan infrastruktur sekolah dasar dan menengah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mencakup infrastruktur ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

b) Menyusun Peta Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu menyusun peta kebutuhan fasilitas pendidikan berbasis data spasial untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang

mengalami kekurangan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

c) Alokasikan anggaran berbasis keadilan spasial

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat mengalokasikan anggaran berbasis keadilan spasial (*equity-based budgeting*), bukan hanya berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga tingkat keterjangkauan geografis dan indeks pembangunan manusia daerah.

d) Audit terhadap kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota, terutama desa-desa tertinggal, terutama untuk mendeteksi kondisi gedung rusak, minimnya alat peraga, dan keterbatasan akses digital. Data tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran secara tepat sasaran.

e) Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, CSR perusahaan, serta lembaga nonprofit untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan seperti kelas digital, perpustakaan keliling, dan pusat belajar masyarakat (*community learning centers*).

f) Insentif Tunjangan, Pelatihan Intensif dan Jalur Karier Khusus

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menawarkan insentif tunjangan, pelatihan intensif, dan jalur karier khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah tertinggal, sebagai bentuk insentif nonfisik untuk mendukung kualitas pendidikan desa. Dan juga, pembangunan fasilitas pendidikan di Provinsi Bengkulu melalui program afirmatif seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan dan program Sekolah Penggerak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

#### 4. Minimnya Integrasi Teknologi dalam Proses Belajar Mengajar di Bengkulu

a) Penguatan Infrastruktur Digital Sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kab/Kota perlu mempercepat pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah, terutama di daerah tertinggal dan pelosok. Pembangunan infrastruktur digital yang memadai dilakukan untuk mendukung pembelajaran hibrida di desa-desa yang belum memiliki akses guru yang memadai, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA. Infrastruktur digital yang dimaksud meliputi pengadaan perangkat komputer, akses internet yang stabil, serta ruang pembelajaran berbasis teknologi.

b) Pelatihan Digital untuk Guru secara Berkala

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu perlu menyusun program pelatihan rutin terkait pemanfaatan teknologi pembelajaran (*e-learning*, aplikasi interaktif, LMS, dsb) yang ditargetkan untuk semua guru. Pelatihan harus bersifat aplikatif dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

c) Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Komunitas Teknologi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi (seperti Telkom, Microsoft, *Google for Education*) untuk mendu-

kung pelatihan guru, donasi perangkat digital, serta pengembangan platform pembelajaran daring lokal.

d) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Teknologi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu harus mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi atas penggunaan teknologi di sekolah, termasuk efektivitasnya terhadap hasil belajar siswa. Data ini penting untuk mengarahkan kebijakan lebih lanjut.

## 5. Tingginya Angka Putus Sekolah di Beberapa Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Untuk menekan angka putus sekolah dan mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diambil:

a) Program Beasiswa Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu memperluas dan mengintensifkan program beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, anak yatim/piatu, dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Bantuan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga perlengkapan belajar, transportasi, dan subsidi makanan bergizi.

b) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pendidikan

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membangun dan merehabilitasi sarana pendidikan, seperti sekolah satu atap (SD-SMP) di daerah terpencil. Ketersediaan transportasi sekolah dan akses internet juga harus diperluas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di desa yang belum terjangkau.

c) Program Pendidikan Kesetaraan

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Lembaga Pendidikan Nonformal (PKBM) perlu mengaktifkan kembali program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) dengan dukungan pendanaan, kurikulum kontekstual, serta pendampingan langsung kepada peserta didik putus sekolah agar mereka dapat kembali belajar dengan fleksibel.

d) Penyusunan Regulasi Lokal Dan Menggunakan Dana Desa

Bapperda Provinsi Bengkulu, Pemerintah Desa, dan Komite Sekolah perlu berkolaborasi untuk mendorong penyusunan regulasi lokal dan menggunakan Dana Desa untuk mendukung anak-anak agar tetap bersekolah. Selain itu, perlu kampanye sosialisasi dan pelibatan orang tua dalam pengawasan dan motivasi belajar anak.

e) Pendataan Terpadu Berbasis Desa Dan Sekolah

Dinas Pendidikan Provinsi & Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen perlu berkolaborasi dalam pelaksanaan sistem pendataan terpadu berbasis desa dan sekolah untuk memantau anak-anak yang berisiko putus sekolah. Data ini penting untuk intervensi dini dan distribusi program bantuan pendidikan secara lebih tepat sasaran.

## F. REFERENSI

- Abdullah, I. (2021). *Desentralisasi Pendidikan dan Peran Pemerintah Daerah dalam SDGs*. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 101–115.
- Alifah, S. (2021). *Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain*. CERMIN: Jurnal Penelitian, 5(1), 113-123.
- Anatasya, E. (2021). *Mutu Pendidikan, Sarana, Prasarana*. Aulad, 4(3).
- Aribowo, R. (2025). *Sebanyak 3.519 Anak di Bengkulu Belum Sekolah*. Diakses pada tanggal 17 September 2025. Diakses pada link: <https://www.beritasatu.com/news/509620/1857-anak-di-bengkulu-selatan-putus-sekolah>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Provinsi Bengkulu*. Bengkulu
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Daerah Provinsi Bengkulu 2024*. BPS Provinsi Bengkulu.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Indeks Daya Saing Daerah 2024*. Jakarta
- Balai Guru Penggerak Bengkulu. 2023. *BGP BENGKULU: Dukung Optimalisasi Peran Komunitas Belajar.id Provinsi Bengkulu*. Diakses pada tanggal 15 September 2025. Diakses pada link: <https://bgpbengkulu.kemdikbud.go.id/index.php/berita-terkini/59-bgp-bengkulu-dukung-optimalisasi-peran-komunitas-belajar-id-provinsi-bengkulu>
- Bastomi, M. I. (2025). *Pengembangan Karir Guru Sebagai Tenaga Pendidik dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan. 5 (2). 36-44
- Dinas Pendidikan Sumatera Barat. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*. Diakses pada tanggal 16 September 2025, Diakses pada link: <https://sumbar.disdik.id/wp-content/uploads/2024/06/LKjIP-2023-cetak-juni-24.pdf>
- Disdik Provinsi Bengkulu. (2024). *Data Pokok Pendidikan Provinsi Bengkulu*.
- de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2017). *Double for Nothing? Experimental Evidence on the Impact of an Unconditional Teacher Salary Increase on Student Performance in Indonesia*. *Quarterly Journal of Economics*, 132(2), 993–1039.
- Idris. (2025). *Peran Administrasi Negara dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Daerah Tertinggal*. Jurnal Administrasi Negara. 3 (1). 319-328
- Johansen, H. T. (2016). *Hambatan dalam Pengintegrasian Pengelolaan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu*. Neliti.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Tahun 2022*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Protal Data Pendidikan*. Diakses pada <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/pendidikan-2/guru-dan-tenaga-kependidikan-2>
- Kurniawan, A., Darmi, T., Indarti, S., Adriadi, R. 2025. *Efektivitas Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Pada Kinerja Guru di Kota Bengkulu*. Journal of Sosial Research. 5 (3). 5596-5606
- Politeknik Caltex Riau. (2020). *Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi*. Diakses pada tanggal 16 September 2025, Diakses pada link: <https://pcr.ac.id/read/30177/tingkatkan-kualitas-pendidikan-vokasi-pcr-buka-program-magister-terapan>

- Prihantini, R. T. S., Effendi, F. P., & Revika, V. L. (2020). *Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Aulad, 4(3). <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.224>
- Putra, A. P., Suparmi, S., & Nurdin, E. (2021). *Pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kompetensi profesional guru di SMA*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(2), 3952–3959. <https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/1563>
- Rakib, M., Rombe, A., & Yunus, M. (2017). *Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalitas Guru*. Jurnal Ad'ministrare, 3(2), 137–148
- Reza, H.K., Judiajnto, L. Susanti, M. (2024). *Persepsi Guru Bersertifikat Interdisipliner terhadap Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru di Kota Bengkulu*. Jurnal Idaarah. 8 (1).
- Sterling, S. (2010). *Transformative learning and sustainability: sketching the conceptual ground*. Learning and Teaching in Higher Education, 5(11), 17-33.
- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Esensi.
- Suyanto, P. (2020). *Implementasi SDG 4 di Daerah: Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kemendikbud.
- Tilbury, D. (2011). *Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning*. UNESCO.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Vozovsky, O. O. (2023). *Peculiarities Of Anti-Crisis Management In The Activity Of Public Administration Bodies*. State and Regions. Series: Public Administration, 3, 85–89.
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. Washington DC: World Bank.